



GPM DI HATI BANGSANYA

Bertumbuh, Bersaksi dan Melayani



Penyunting

Johan Robert Saimima, Rudolf Rahabeat,
Hery Siahay, Jerry Takdare, Weldemina Tiwery

Katalog Dalam Terbitan

275.85
Gpm

GPM di hati bangsanya : bertumbuh, bersaksi dan melayani /
penyunting: Johan Robert Saimima...[et al.]-- Salatiga : Satya
Wacana University Press bekerjasama Majelis Pekerja Harian
(MPH) Sinode GPM, 2018.
412p. ; 23 cm.

ISBN 978 6025 881152

1. Church and state 2. Church and social problems 3. Protestant
churches--Maluku I. Saimima, Johan Robert

ISBN 978 6025 881152

Desain Cover : Media Center GPM

All rights reserved. Save Exception stated by the law, no part of this
publication may be reproduced, stored in a retrieval system of any nature, or
transmitted in any form or by any means electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise, included a complete or partial
transcription, without the prior written permission of the author, application
for which should be addressed to author.



Diterbitkan oleh:

Satya Wacana University Press

Universitas Kristen Satya Wacana

Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga

Telp. (0298) 321212 Ext. 229, Fax. (0298) 311995

Bekerja sama dengan

Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM
Ambon - Maluku

DAFTAR ISI

Sambutan 1 Mayjen TNI Doni Monardo (Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia).....	iii
Sambutan 2 Prof. Dr. Thomas Pentury (Direktur Jenderal Bimas Kristen Republik Indonesia).....	vi
Kata Pengantar Pdt. A.J.S. Werinussa, M.Si (Ketua MPH Sinode GPM).....	ix
Catatan Editor Johan Robert Saimima, Rudolf Rahabeat, Hery Siahay, Jerry Takdare, Weldemina Yudith Tiwery	xvi
Daftar Isi	xix
Bagian I: GPM dan Semangat Pergerakan Nasional Indonesia.....	1
1. Perkembangan Gereja dan Masyarakat Kristen Maluku di Masa Kekuasaan Kolonial Belanda Dr. M. Tapilatu.....	1
2. Spirit Kekristenan di Maluku dalam Memperkokoh Nasionalisme Indonesia Johan Saimima, M.A.....	26
3. Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam Spirit Nasionalisme Dr. Zeth sahuburua, Sh, Mh.....	38
Bagian II: Peran GPM dalam <i>Nation and Character Building</i>	55
4. Artikulasi GPM dalam Dinamika Kebangsaan Indonesia Dr. John Ruhlessin, M.Si.....	55
5. GPM dan Konflik Sosial: Perspektif Sosiologi Prof. Tonny D. Pariela.....	68

6. GPM dan Dialektika Kebangsaan Indonesia: Perspektif Eklesiologis-Institusional GPM Elifas T. Maspaitella, M.Si.....	88
7. Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Iman Kristen Untuk Membangun Masyarakat yang Berdaya Saing Gatut Priyowidodo.....	111
Bagian III: GPM dan Tindakan Pengaktualisasian Nilai-Nilai Kekristenan.....	130
8. Teologi Politik: <i>Refleksi Teologis dalam Konteks Masyarakat Kepulauan Maluku</i> Dr. Steve Gaspersz.....	130
9. Dinamika Dunia Pendidikan Tinggi di Maluku dan Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan Dr. Agusthina Ch Kakiay-Sapulette.....	153
10. Pemanasan Global, Perubahan Iklim dan Penaikan Muka Air Laut serta Dampaknya terhadap Pulau-Pulau Kecil: Kasus Maluku J.M.S. Tetelepta.....	164
11. Peran Gereja Protestan Maluku dalam Penegakkan Hukum Prof. Nus Sapteno.....	180
Bagian IV: GPM dan Perwujudan Nilai-nilai Oikumene Kebangsaan.....	206
12. Kerjasama Katolik dan Protestan di Maluku MGR.P.C. Mandagi, MSC.....	206
13. Meretas Jalan Damai Berbasis Masyarakat dan Agama: Dari Maluku untuk Indonesia dan Dunia Jack Manuputty, M.A.....	212

14. GPM dalam Lintasan Perdamaian Maluku M. Ikhsan Tualeka, M.I.K.....	227
15. Politisasi Agama di Indonesia: Luka di Hati Bangsa Eklepinus J. Sopacuaperu.....	234
16. GPM dan Dimensi Sosial Budaya: Perspektif Antropologi Prof. J.W. Ajawaila.....	259
Bagian V: GPM dan Tindakan Merawat Keutuhan Ciptaan.....	271
17. Memikirkan Teologi Anti-Deforestasi: Gereja Melawan Kekerasan Lingkungan dalam Penghancuran Hutan di Maluku Dr. Izak Y. M. Lattu.....	271
18. Dari ODHA Menjadi Sadha: Catatan Pelajaran Moral dari GPM tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Ambon-Maluku Dr. Saidin Ernas	296
19. Memperkuat Persekutuan Keluarga, Gereja dan Masyarakat untuk Kebersamaan Yang Bermutu dengan Seluruh Ciptaan Dr. M. M. Hendriks- Ririmasse.....	324
20. Eklesiologi Kontemporer di Indonesia Menyimak Model-Model Relasi Gereja, Masyarakat dan Teologi Dr. Ebenhaizer I Nuban Timo.....	336
Makna Dibalik Sampul Buku.....	357

Spirit Kekristenan di Maluku dalam Memperkokoh Nasionalisme Indonesia

Johan R. Saimima, M.A.

Tanggung Jawab sebagai Warga Negara

Setiap warga negara memiliki tanggung jawab besar atas semua dimensi kehidupan dan segala sesuatu yang berlaku dalam negaranya, termasuk bertanggung jawab atas maju dan mundurnya negara itu. Terhadap kemajuan negara ia memuji pemerintah. Terhadap kemunduran ia memberikan kritik kepada pemerintah dengan jalan-jalan dan saluran-saluran yang legal. Karena itu, warga negara yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berlaku dalam negara, apabila ia mempunyai keinsyafan kenegaraan (*staatsbewustzijn*) dan keinsyafan kenegaraan tidak dapat tumbuh, jika tidak ada suatu keinsyafan kebangsaan (*volksbewustzijn*). Leimena berpandangan bahwa kita tidak dapat mengatakan kalau kita adalah warga negara Indonesia, jika pada kita tidak ada suatu keinsyafan tentang diri kita sebagai anggota dari pada suatu organisme yang bernama negara Indonesia dan jika pada kita tidak ada suatu keinsyafan bahwa kita adalah anggota dari pada suatu persekutuan yang disebut bangsa Indonesia (Leimena, 1995).

Selain memiliki tanggung jawab sebagai warga negara, orang Kristen secara rohani memiliki tanggung jawab kepada Tuhan yang disembahnya. Terkait hal ini, Leimena mengemukakan bahwa orang Kristen mempunyai suatu kedudukan yang “paradoxal”. Ia adalah warga dari negaranya dalam dunia ini dan ia adalah warga dari Kerajaan Kristus. Ia mempunyai “double citizenship” (dwi kewarganegaraan). Hal ini pula mengakibatkan suatu ketegangan (*spanning*) dalam kehidupannya sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang turut bertanggung jawab terhadap kehidupan negara, orang Kristen harus turut serta dalam menentukan pemerintah negara dan turut serta dalam menentukan peraturan-peraturan

hukum, undang-undang, dan lain-lain hal yang mengatur kehidupan negara (Leimena, 1995).

Hubungan Gereja dan Negara

Dalam ketegangan identitas sebagai warga negara dunia dan warga dari Kerajaan Kristus, muncul pertanyaan “bagaimana orang Kristen dapat hidup dengan Tuhannya dan bersamaan dengan itu hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab?”. Pertanyaan ini dijelaskan oleh Leimena sebagaimana uraian berikut ini:

1. Luther mengemukakan teori “dua lingkungan” (*twee rijken*) atas dasar nisbah (perhubungan) dari hukum Taurat dan Injil (*Wet en Evangelie*). Menurut Luther; Injil termasuk lingkungan Gereja dan hukum Taurat termasuk lingkungan gedung perwakilan rakyat (*raadhuis*). Injil menguasai “kehidupan batin”. Negara dan Gereja merupakan dua lapangan yang terpisah satu dari yang lain. Dengan demikian, kehidupan negara gampang dilepaskan dari penguasaan Kristus. Dalam praktek Nazi Jerman kita lihat bahwa gereja yang membiarkan kehidupan negara akhirnya dikuasai negara.
2. Calvin mengajar: “kerkelijke dienst van God” (kebaktian kepada Allah dalam dan oleh kehidupan kekristenan) dan “politieke dienst van God” (kebaktian kepada Allah di lapangan kehidupan politik). Menurut Calvin, terdapat dua lingkungan yakni lingkungan Gereja dan lingkungan dunia, tapi Tuhan Yesus Kristus adalah Kepala daripada gereja dan dunia. Pandangan Calvin sedemikian mendorong dirinya untuk menetapkan kebijakan mengenai “politieke ordening” (aturan-aturan ketertiban politik). “Politieke ordening” harus memuliakan nama Tuhan dengan jalan mengatur keadilan, perdamaian, dan kemerdekaan secara duniawi (*uiterlijk recht, uiterlijk vrede, uiterlijke vrijheid*). Karena itu, orang Kristen wajib bekerja

bersama dengan orang-orang yang berkuasa di lapangan politik.

3. Barth mengemukakan bahwa negara harus dipandang dari sudut kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Kepala dari gereja dan negara. Karena itu, negara mempunyai tugas menurut ketentuan Allah di dalam dunia yang penuh dosa dan dalam dunia itulah berdiri gereja. Negara menjalankan tugas itu menurut kebijaksanaan (*inzicht*) dan kesanggupan (*vermogen*) yang ada padanya. Ia menyelenggarakan hukum (keadilan) dan perdamaian dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Kalau gereja benar-benar mengakui kekuasaan Tuhan Yesus Kristus, maka ia tak boleh mengisolir diri dalam dinding gereja. Sebaliknya, gereja mesti terbuka terhadap masyarakat umum sebagai lingkaran yang luas (*buitenste cirkel*). Karena itu, hubungan antara gereja dan negara adalah hubungan dari lingkaran-lingkaran yang konsentris (*concentrische cirkels*), di mana gereja dengan lingkaran dalam (*binnenste cirkels*) yang berpusat pada kekuasaan Kristus dan negara dengan lingkaran yang luas (*buitenste cirkel*), yang bertemu pada satu titik pusat (*middelpunt*) yaitu Yesus Kristus (Leimena, 1995).

Ketika gereja dan negara saling berelasi secara akrab bukan berarti harus terjadi percampuran di antara gereja dan negara. Barth berpandangan bahwa gereja harus menjaga agar jangan sampai ia menjadi negara dan negara tak boleh menjadi gereja. Gereja memperingatkan pemerintah dan seluruh warga negara kepada Kerajaan dan keadilan Allah.

Teori-teori tentang negara dari Luther, Calvin, dan Barth, sebagaimana yang dikemukakan di atas, adalah teori-teori yang berlaku khusus dalam negara-negara dengan tradisi kekristenan yang kuat dan negara-negara yang keadaannya tidak sama dengan negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, yang sebagian besar masyarakatnya terdiri atas orang-orang

yang tidak beragama Kristen (Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya). Karena itu, orang Kristen harus menyetujui suatu dasar negara yang dapat didukung oleh semua orang, yang memeluk berbagai agama itu, dan dasar negara itu haruslah sekuler. Namun, negara sekuler ini harus dipandang oleh umat Kristen dari sudut kekristenan (Leimena, 1995).

Negara menurut sudut pandang Kristen adalah hamba Allah (Rm. 13:6) yang berkewajiban untuk menyelenggarakan/memelihara ketertiban dunia atas dasar hukum dan keadilan, serta menciptakan kemungkinan-kemungkinan kepada setiap warga negara untuk bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sebagai bagian yang ada di dalam negara, gereja dan orang Kristen pada umumnya harus turut serta menegakkan ketertiban yang menjadi kewajiban utama negara. Gereja tidak dapat membagi kehidupannya dalam dua lapangan yang terpisah, yakni: kehidupan rohani dan kehidupan politik. Karena, Kerajaan Allah sebagai inti pemberitaan gereja harus dikabarkan dalam semua lapangan kehidupan, juga dalam lapangan politik. Gereja menurut “panggilannya” dalam lapangan politik harus menentukan sikap menurut situasi dan persoalan yang dihadapinya (Leimena, 1995).

Sikap Politik Gereja dan Umat Kristen dalam Kehidupan Berbangsa

Orang Kristen sebagai warga negara akan sering berhadapan dengan masalah kenegaraan baik yang sulit maupun yang mudah. Ketika orang Kristen berhadapan dengan masalah di negara ini, maka tanggung jawab orang Kristen adalah untuk memecahkan masalah negara tersebut. Syarat mutlak untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik adalah memiliki keinsyafan kenegaraan. Ketika rasa insyaf kenegaraan dimiliki oleh setiap orang Kristen, maka kesadaran insyaf tersebut harus berjalan berdampingan dengan kecintaan pada tanah air Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke (Leimena, 1955).

Leimena mengemukakan bahwa sebagai orang Kristen kita tidak dapat mengatakan bahwa kita adalah warga negara Indonesia, jika pada kita tidak ada suatu kesadaran bahwa kita adalah anggota dari pada suatu organisme yang bernama negara Indonesia dan jika pada kita tidak ada suatu kesadaran bahwa kita adalah anggota dari suatu persekutuan yang disebut bangsa Indonesia (Leimena, 1955). Untuk membimbing orang Kristen supaya memiliki tanggung jawab sebagai warga negara yang baik gereja sebagai institusi memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi organisasi dengan baik pula. Gereja merespons panggilan Allah terhadap dirinya dengan menyatakan Kerajaan Allah di bangsa ini.

Gereja bertanggung jawab membangun masyarakat sebagai suatu penjelmaan dari ciptaan yang baru (*herscheping*) dalam dunia. Gereja membangun dunia ini dengan menempatkan keberadaannya sebagai gereja yang sejati; gereja yang membangun persekutuan dengan persekutuan-persekutuan lain di bangsa ini dengan jalan menghubungkan orang-orang yang tidak mempunyai ikatan apa-apa; mempertemukan orang-orang yang hidup terasing dengan sesama manusia lainnya. Dengan demikian, gereja menjadi persekutuan yang bernilai di negara ini (Leimena, 1955). Gereja yang bernilai di bangsa ini adalah gereja yang dapat mewujudkan keinsyafan gerejani; keinsyafan tentang tugas terhadap pemerintah dan negara untuk membangun satu negara yang di dalamnya terdapat perdamaian dan kesejahteraan (Saimima, 2017).

Dalam hal kecintaan, kesetiaan, ketaatan dan pengorbanan bagi tanah air, bangsa, dan negara, orang Kristen tidak boleh kurang dari orang lain. Bahkan, ia harus menjadi teladan bagi orang lain sebagai pecinta tanah air, serta warga negara yang bertanggung jawab dan nasionalis sejati. Tindakan demikian adalah refleksi dari kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhan dengan pengertian “*Soli Deo Gloria*” (segala kemuliaan adalah hanya bagi Tuhan). Agar dapat berkarya yang terbaik bagi negara, orang Kristen harus

melepaskan segala “minderwaardigheids-complexen,” yang mungkin ditimbulkan oleh anggapan-anggapan dari golongan lain yang memandang orang Kristen sebagai golongan minoritas. Terhadap anggapan ini orang Kristen harus mempunyai suatu sikap tegas bahwa umat Kristen bukanlah suatu minoritas. Dilihat dari sudut ketatanegaraan ia bukan warga negara kelas 2 atau kelas 3. Orang Kristen adalah warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti warga negara lain. Bersama dengan warga negara yang beragama lain orang Kristen harus bersedia dan sanggup mencurahkan pikiran dan tenaganya bagi pembangunan negara (Leimena, 1955).

Agar dapat mengaktualisasi perannya secara nyata di bangsa ini penting bagi orang Kristen untuk memahami dan memaknai ajaran etika agama Kristen tentang mencari kebaikan bersama bagi seluruh umat manusia. Tindakan sedemikian merupakan wujud aktualisasi wahyu Ilahi demi terbangunnya suatu persekutuan manusia secara universal. Karena itu, orang Kristen diwajibkan untuk melakukan pelayanan yang baik kepada seluruh umat manusia. Pandangan ini yang melahirkan konsep utilitarian yang berarti memandang semua masyarakat adalah satu kesatuan. Menurut Clement C. J. Webb, utilitarian memungkinkan setiap orang dapat terus terang untuk menerima masyarakat nasional berdasarkan (tanpa dibatasi) "darah dan ras" sebagai dasar yang alami untuk pengembangan moralitas (Webb, 1940). Pandangan ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan idealis yang berkembang di kalangan masyarakat Inggris dengan membedakan manusia atas dasar “ras” dan “darah”. Perbedaan manusia yang dibuat berdasarkan "ras" dan "darah", menurut kaum utilitarian, adalah tidak layak untuk sebuah proses asimilasi (Saimima, 2017).

Pandangan Kristen tentang utilitarian sedemikian telah menjadi kekuatan penyanggah nasionalisme Indonesia ketika berhadapan dengan menguatnya nasionalisme etnik/daerah,

terutama di Maluku, yang muncul dalam kehidupan berbangsa sejak Indonesia merdeka sampai sekarang ini.

Politik Nasional Keagamaan GPM di Indonesia

Keterlibatan GPM dalam sejarah untuk mendukung kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi adalah realitas historis yang menggambarkan bahwa GPM adalah bagian ideologis maupun fisik dari perjuangan menjadi Indonesia yang seutuhnya. Kehadiran tokoh-tokoh GPM, antara lain: Pdt. S. Marantika, Pdt. C. Sahusilawane, Pdt. W. D. F. Amanupunyo, dan Pdt. J. Uneputti, dalam Konferensi Malino pada tanggal 15-25 Maret 1947 untuk membicarakan hubungan gereja dan negara pada masa pergolakan politik di Negara Indonesia Timur (NIT) dan sikap gereja terhadap penguasa kolonial yang masih berpengaruh di NIT menunjukkan keseriusan GPM untuk membangun masa depan Indonesia (Ngelow, 1994: 191).

Konferensi Malino yang dihadiri oleh GPM bersama wakil-wakil gereja dan zending yang berada di wilayah Indonesia Timur itu telah menghasilkan 6 butir “Rumusan Malino”. Butir 4 dan 5 berisikan tentang peran orang Kristen dalam membangun bangsa, yakni: (4) tugas-tugas gereja dalam pembentukan Negara Indonesia merdeka; dan (5) kesediaan orang Kristen bekerja sama dengan sesama warga negara yang beragama lain dalam membangun bangsa. Pada butir ke-4 mengenai tugas gereja dalam pembentukan Negara Indonesia Merdeka, khususnya point b, menegaskan bahwa “gereja bertugas untuk mengoesahkan sekoeat-sekoeatnja seopaja Negara Indonesia jang merdeka itoe mendjadi soeatoe negara-hoekoem (*rechtsstaat*)” (Ngelow, 1994: 191).

GPM pun menciptakan sejarah baru bagi keberadaannya secara institusional di Indonesia sesudah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia (RI) dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RI. Sejarah yang menjadi penanda keindonesiaan GPM di kemudian hari adalah pada saat berhadapan dengan proklamasi Republik Maluku

Selatan (RMS) pada tanggal 25 April 1950. Sinode GPM membicarakan tentang persoalan penyerahan kedaulatan RI pada akhir bulan Desember 1949 dan menghasilkan keputusan bahwa penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah RI adalah suatu hari besar bukan saja bagi bangsa, melainkan juga bagi GPM. Sikap Sinode GPM ini merupakan sikap politik keindonesiaan GPM yang pertama dalam sejarah gereja di Maluku dan sikap yang secara resmi mengatasmakan gereja secara institusional. Menindaklanjuti keputusan Sinode GPM yang menyambut penyerahan kedaulatan RI tersebut, Sinode GPM melakukan sebuah kebaktian resmi dalam gereja pusat di Kota Ambon dan menyampaikan suatu pesan gereja kepada setiap anggota jemaat yang menyatakan: “Pemerintah (Indonesia) itulah pemerintah kita dan seterusnya pemerintah kita itulah hamba Allah”. Pernyataan ini diambil dari Kitab Suci (Alkitab) yakni Roma 13. Pesan GPM ini kemudian disebarluaskan kepada Jemaat-jemaat GPM di seluruh wilayah Maluku dengan cara dibacakan oleh Pendeta-pendeta GPM kepada anggota Jemaat di atas mimbar dalam rumah-rumah gereja (Saimima, 2018; ANRI, GPI no. 100).

Peran GPM untuk menyokong tegaknya Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat terus nampak dalam partisipasi GPM guna memperlancar program Pemerintah RI, yakni: mempercepat rasa aman masyarakat dan mendorong terjadinya pemulihan keamanan di Maluku pada masa perang antara RMS dengan RI. GPM memberikan dukungan kepada Presiden Soekarno dengan Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959, serta mendukung amnesti dan abolusi Presiden RI kepada tokoh-tokoh RMS di Maluku yang saat itu berada di Pulau Seram. Agar GPM dapat berjumpa dengan Soumokil dan pasukan RMS di Seram, GPM membuat tim yang dipimpin oleh Pdt. Tom Pattiasina. Mereka pergi ke Seram dan tinggal selama satu bulan di Kairatu guna melakukan pendekatan dengan RMS. Namun, hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan oleh GPM maupun

Pemerintah RI, karena Soumokil dan pendukung RMS menolak permintaan untuk menyerah kepada RI (Tanamal, 2001).

GPM memilih untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan persoalan RMS di Maluku, yang lahir dari sebuah refleksi teologis yang dilakukan oleh GPM terhadap keberadaannya di Indonesia. Berdasarkan pada ajaran Kitab Suci (Alkitab), GPM mengaku bahwa semangat kasih dan persaudaraan yang didasarkan pada Alkitab telah menuntun GPM untuk hidup bersama dengan sesama warga negara lainnya di Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dianggap oleh GPM sebagai karunia dan anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan. Karena itu, GPM memiliki tekad untuk membangun bangsa Indonesia bersama-sama dengan sesama warga negara yang beragama lain di Indonesia. Sikap politik yang ditunjukkan GPM adalah bagian dari komitmen gereja sebagai wujud ekspresi atas kondisi masyarakat Maluku Kristen yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Saimimia, 2018).

Ekspresi keindonesiaan GPM yang telah diuraikan di atas menunjukkan kepada publik bahwa GPM mempunyai sejarah yang dinamis di bangsanya. GPM selalu membarui diri menurut kebutuhan masyarakat di dalam konteks Negara Republik Indonesia. Tulisan ini hanya sebuah tulisan kecil yang sesungguhnya memiliki kaitan dengan tulisan lain yang menjelaskan tentang perjuangan politik keagamaan masyarakat Kristen seperti perjuangan orang Kristen di Afrika, sebagaimana diuraikan oleh Mandy Goedhals tentang *African Nationalism and Indigenous Christianity*. Dalam tulisan ini Goedhals menjelaskan bahwa orang-orang Afrika berjuang untuk melawan kaum kulit putih yang melakukan diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam Afrika. Mereka menginginkan terbentuknya gereja nasional yang akan menampung semua elemen bangsa. Mereka juga berjuang untuk membangun kemandirian Afrika menjadi bangsa”.

Perjuangan orang Afrika ini seperti yang dilakukan oleh James Calata sebagai tokoh politik Afrika Selatan yang berjuang di pentas politik Afrika yakni Kongres Nasional Afrika (Goedhals, 2003). GPM pun memiliki kesadaran terhadap realitas yang beragam di sekitarnya. Karena itu, GPM menginginkan agar gereja mestinya hidup berdampingan dengan sesamanya yang berbeda agama, etnis, dan suku lainnya di Indonesia sehingga dapat menciptakan suatu gereja yang bercirikan “Gereja Nasional” di bangsa ini.

Daftar Pustaka

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). *Arsip GPI no. 100: Warta Sinode GPM pada Sidang Badan Pekerja Sinode Am GPI*, Mei 1951.

- Goedhals, Mandy “African Nationalism and Indigenous Christianity: A Study in the Life of James Calata (1895-1983)”, dalam *Journal of Religion in Africa*, Vol. 33, Fasc. 1 (Feb., 2003).
- Leimena, J. *Kewarganegaraan yang Bertanggung Jawab*. Naskah ceramah yang disampaikan pada Konperensi Studi Pendidikan Agama Kristen di Sukabumi pada tanggal 20 Mei-10 Juni 1955” dalam <http://www.leimena.org/id/page/v/41/buku>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.
- Ngelow, Zakaria. *Kekristenan dan Nasionalisme* , 1994., dalam <http://www.leimena.org/id/page/v/285/kekristenan-dan-nasionalisme>, diakses pada tanggal 7 Februari 2017.
- Saimima, Johan R. *GPM's Resistance to RMS in 1950-1966: the Historical Consequence of AMK's Resistance to the Indische Kerk's Governmentality in 1930-1933*, disampaikan pada *International Conference on Religion and Public Civilization (ICRPC)* di Hotel Pacific-Ambon, 3-5 Mei 2018.
- _____. *Nasionalisme Masyarakat Kristen Maluku, 1931-1966*, disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian Disertasi Program Studi S3 Ilmu-ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta, 24 Agustus 2017.
- Tanamal, Piet. “RMS Sudah Ditolak dalam Pesan Tobat GPM Tahun 1960”, dalam Surat Kabar *Siwalima*, Senin, 23 April 2001.
- Webb, Clement C. J. “Ethics, Christianity, and Nationalism”, dalam *Philosophy*, Vol. 15, No. 57 (Jan., 1940), hlm. 38-50.